

KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU TERHADAP MAJELIS TA'LIM

*(Studi terhadap Penguasa Orde Baru yang Memanfaatkan Pendidikan
untuk Kepentingan Politik)*

Zaini Dahlan

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan
Jln. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate
zainidahlanannuri@gmail.com

Abstrak: Artikel ini ingin mengemukakan bahwa politik dan pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun aspek pendidikan yang tersentuh oleh kepentingan politik adalah pendidikan non formal, dalam hal ini adalah Majelis Ta'lim. Upaya-upaya Pemerintah Orde Baru dalam mengatur pelaksanaan kegiatan Majelis Ta'lim agar tidak digunakan sebagai sarana politik praktis antara lain dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 44 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Dakwah Keagamaan dan Kuliah Shubuh di Radio, dan Instruksi Menteri Agama RI. Nomor 5 tahun 1981 tentang Bimbingan Pelaksanaan Dakwah/Khutbah/Ceramah Agama. Hal ini merupakan upaya Pemerintah dalam meredam kepentingan-kepentingan politik Islam dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan kepentingan umat Islam. Upaya pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakannya tersebut dilakukan melalui 1) pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh umat Islam, 2) membentuk organisasi-organisasi yang menampung aspirasi umat Islam seperti, ICMI, DKMI, KODI dan lain sebagainya, 3) merespon aspirasi umat Islam dengan menghapus kebijakan-kebijakan yang dinilai mencederai kepentingan umat Islam, seperti pelarangan jilbab di sekolah-sekolah, penghapusan SDSB, dan lain-lain, 4) memenuhi aspirasi kepentingan umat Islam seperti membangun masjid-masjid di pelosok-pelosok daerah, pembentukan Bank Muamalat, pengiriman da'i-da'i ke daerah transmigran, dan lain-lain. Reaksi umat Islam dalam menanggapi kebijakan Pemerintah tersebut antara lain, dengan melakukan restrospeksi dalam penyampaian dakwah mereka, sehingga tidak menimbulkan kerawanan di tengah-tengah masyarakat. Meskipun hal ini sempat menimbulkan reaksi keras dari umat Islam, bahkan sempat menimbulkan ketegangan antara Pemerintah dan umat Islam, terutama para politisi muslim.

Kata Kunci: Orde Baru, Majelis Ta'lim, Politik, Pendidikan

Pendahuluan

Dalam sistem pemerintahan negara, intervensi pemerintah terhadap institusi pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Di dunia Islam misalnya, keberadaan Madrasah Nizhâmiyah yang didirikan oleh penguasa Bani Saljuk, Nizhâm al-Mulk (bermadzhab Sunni), memiliki kepentingan-kepentingan

dalam mengikis dan menghadang paham-paham Syi'ah dengan mendirikan Madrasah Nizhâmiyah di setiap kota di Irak dan Khurasan.¹ Hal ini dilakukan mengingat melalui institusi pendidikan madrasah merupakan media yang cukup efektif dalam proses transformasi pendidikan dan sosialisasi pemahaman keagamaan maupun politik.² Hubungan kedua institusi ini, saling membutuhkan satu sama lain. Penguasa menghendaki eksistensi kekuasaan, sementara madrasah membutuhkan dana-dana finansial untuk melestarikan budaya akademisnya.³ Dengan demikian dapat diketahui bahwa politik pendidikan dalam dunia Islam memang telah ada sejak masa awal pelembagaan institusi pendidikan.

Dalam keterkaitan kebijakan⁴ pemerintah terhadap pendidikan terdapat teori-teori yang mendukung adanya hubungan antara politik dan pendidikan, ada pula yang menolak hubungan antara keduanya. Tokoh yang menolak hubungan antara politik dan pendidikan di antaranya adalah Thomas H. Eliot⁵ dan Edward Said⁶.

Pemerintah Republik Indonesia, merupakan salah satu institusi negara yang tidak memisahkan pendidikan dengan politik. Salah satu upaya politisasi

¹Abd. Mukti, *Konstruksi Pendidikan Islam (Belajar dari Kejayaan Madrasah Nizamiyah Dinasti Saljuq)* (Bandung: Citapustaka Media, cet. I, 2007), h. 111.

²Sebagaimana diungkapkan oleh Easton, bahwa prasyarat fundamental bagi bertahannya sebuah sistem politik adalah apabila orang-orang yang terlibat dalam sistem politik tersebut berhasil mentransfer ilmu pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang mereka kehendaki. Lihat, David Easton, dalam M. Sirozi, *Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 44.

³Abd. al-Rahman al-Nahlawy, *Ushûl al-Tarbiyah al-Islâmiyah wa Asâlibuhâ*, (Dâr al-Fikr: Damsyik, t.t.), h. 109.

⁴Kebijakan dibedakan dengan kebijaksanaan. "Kebijaksanaan" dimaksudkan dalam bahasa Inggris dengan *Policy*, sementara "Kebijakan" dimaksudkan dalam bahasa Inggris dengan *wisdom*. Lihat; Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan Masa Depan*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. I, 1996), h. 12. Kata asal tersebut menghasilkan tiga jenis pengertian yang sekarang ini dikenal, yaitu *politic*, *policy* dan *polic*. *Politic* berarti seni dan ilmu pemerintahan, *policy* berarti hal-hal mengenai kebijaksanaan pemerintah, sedangkan *polic* berarti hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan. Lihat; Supandi dan Achmad Sanusi, *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan*, (Jakarta: P2LPTK, 1988), h. 45.

⁵Thomas H. Eliot mengatakan; intervensi politik terhadap pendidikan telah merusak sistem sekolah khususnya dalam penggunaan patronase, pengangkatan staf, penentuan kontrak-kontrak kerja yang mengabaikan hal terbaik bagi anak-anak. Lihat Thomas H. Eliot, *Toward an Understanding of Public School Politics, in American Political Science Review*, Vol. 53, No. 4 (December), h. 1032-1051. dalam M. Sirozi, *Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 22.

⁶Edward Said mengatakan bahwa "ilmu yang benar adalah ilmu yang bersih dari intervensi politik, sementara ilmu politis itu bukanlah ilmu yang benar". Lihat Edward Said W., *Orientalism*, (London: Vintage, 1978), h. 15.

pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah mengatur keberadaan pendidikan dengan dimasukkannya dalam amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 31, ayat 1 dan 2. Salah satu bentuk konkritnya adanya Departemen Pendidikan.

Sementara dalam aspek pendidikan Islam, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Departemen Agama mengatur segala kepentingan pendidikan Islam agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Hal ini tercermin dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap dunia pendidikan Islam.

Majelis Ta'lim⁷ sebagai sebuah sistem pendidikan Islam nonformal⁸ merupakan sistem pendidikan Islam tertua di Indonesia, bahkan dalam dunia Islam, meskipun pada saat itu belum dikenal dengan istilah Majelis Ta'lim. Hal ini dikarenakan Majelis Ta'lim selain sebagai sarana pendidikan, ia dijadikan pula sebagai media dakwah yang cukup efektif, sehingga keberadaan Majelis Ta'lim tidak dapat terlepas dengan unsur-unsur dakwah Islam yang sudah dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad saw.⁹

⁷Perkataan '*Majelis Ta'lim*' berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata, yaitu *majelis* dan *ta'lim*. *Majelis* artinya tempat duduk, tempat sidang, dewan. Dan *ta'lim* yang diartikan dengan pengajaran. Dengan demikian, secara *lughawi* '*majlis ta'lim*' adalah tempat untuk melaksanakan pengajaran atau pengajian agama Islam. Lihat, Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, lintas sejarah pertumbuhan dan perkembangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995), h. 201. Adapun secara terminologi, Majelis Ta'lim adalah; lembaga pendidikan nonformal Islam yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan diikuti oleh jama'ah yang relative banyak, dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah swt, antara manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan lingkungannya, dalam rangka membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah swt. Lihat, Nurul Huda *et.al.*, *Pedoman Majelis Ta'lim*, (Jakarta: Proyek Penerangan Bimbingan Dakwah Khutbah Agama Islam Pusat, 1984), h. 5.

⁸Pendidikan non formal ialah "pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat", lihat, Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 79.

⁹Di dalam sejarah Islam tercatat bahwa pusat pendidikan yang pertama kali muncul adalah rumah Arqâm bin Aby al-Arqâm. Setelah itu, pusat-pusat pendidikan difokuskan di Masjid-masjid. Masjid yang pertama kali didirikan adalah masjid Quba. Di masjid ini diadakan lingkaran-lingkaran belajar (*hâlaqah*). Untuk menunjang proses pendidikan dan pengajaran, lalu dibangunlah *al-shuffah*. Di *al-shuffah* ini Rasulullah memberikan pelajaran kepada sahabat dan melatih beberapa orang diantara mereka untuk menjadi guru yang mampu mengajar beberapa pelajaran yang berlainan. Lihat Mukti, *Konstruksi Pendidikan*, h. 25.

Otoritas Majelis Ta'lim sebagai pendidikan yang berbasis pada masyarakat¹⁰ merupakan keunikan tersendiri jika dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang melingkupinya. Kepentingan-kepentingan tersebut terkait pada; 1) kepentingan pemerintah terhadap Majelis Ta'lim; kepentingan tersebut terkait dengan Majelis Ta'lim sebagai sarana yang efektif untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan pemerintah dengan masyarakat. 2) kepentingan kelompok atau golongan yang menyelenggarakan kegiatan Majelis Ta'lim. Hal ini terkait dengan tujuan dan misi yang diemban pelaksana kegiatan yang biasanya terdiri dari berbagai kelompok kepentingan, seperti ormas, orpol, sekte keagamaan, kalangan professional maupun pribadi. 3) kepentingan pendidikan sebagai profesionalisme akademik.

Sementara masa Orde Baru merupakan masa di mana kepentingan politik antara umat Islam dengan pemerintah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Hal ini ditandai antara lain oleh; 1) ditumbangkannya Orde Lama melalui proses kudeta yang gagal. Dalam hal ini pemerintah Orde Baru dibantu oleh tokoh-tokoh dan Ormas Islam dalam menumpas kelompok PKI; 2) terdapat upaya depolitisasi politik Islam dengan diberlakukannya restrukturisasi partai menjadi dua partai (PPP dan PDI) serta Golkar;¹¹ 3) implementasi asas tunggal terhadap partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan; 4) hubungan represif pemerintah terhadap umat Islam dengan keluarnya kebijakan-kebijakan yang dinilai mendiskreditkan kepentingan umat Islam; 5) munculnya kelompok intelektual muda yang mampu mengakomodasi harmonisasi hubungan antara pemerintah dengan umat Islam; 6) perubahan sikap pemerintah kepada sikap akomodatif terhadap kepentingan umat Islam dengan ditandai masuknya para tokoh-tokoh Islam dalam Kabinet Pembangunan IV dan V.

Dalam penulisan makalah ini, penulis memfokuskan keterkaitan antara kepentingan pemerintah Orde Baru dengan Majelis Ta'lim melalui kebijakan-

¹⁰Umar Tirtarahardja dan La Sulo, S. L., *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet. II, 2005), h. 181-182. Lihat pula Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), h. 201.

¹¹Yusril mengomentari kedudukan Golkar dalam politik Indonesia; "Golongan Karya (Golkar) meskipun memenuhi segala syarat dan rukun - kalau menggunakan istilah fikih - untuk disebut sebagai partai politik, menolak dirinya sebagai partai". Lihat, <http://yusril.ihzamahendra.com/2008/01/31/kebijakan-orde-baru-terhadap-masyumi-dan-islam/>, didownload tanggal 18 Juli 2015.

kebijakan yang diambil. Hal yang menjadi dasar penulis tertarik untuk mengkaji kebijaksanaan pemerintah Orde Baru didasarkan pada; 1) masa pemerintahan Orde Baru paling lama, sejak Indonesia merdeka hingga sekarang;¹² 2) banyak terjadi intrik-intrik politik dalam upaya mengukuhkan kekuasaannya;¹³ 3) terdapat pasang surut hubungan pemerintah dengan Islam;¹⁴ 4) Majelis Ta'lim merupakan sarana yang rentan terhadap konflik kepentingan.¹⁵

Dalam hal ini, Majelis Ta'lim memiliki potensi konflik dari aspek agama, organisasi, intervensi pemerintah dan respons atas kemajuan. Kedudukan Majelis Ta'lim sebagai sebuah sistem lembaga ke-Islaman, memiliki akar yang kuat dalam sub bidang keagamaan Islam yakni; dakwah dan pendidikan. Dalam aspek

¹²Masa Orde Baru berlangsung selama 32 tahun sejak runtuhnya rezim Sukarno dan naiknya rezim Soeharto pada tahun 1966 sampai runtuhnya kembali rezim Soeharto oleh gelombang reformasi pada tahun 1998. Peralihan dari Orde Lama di bawah rezim Soekarno ke Orde baru di bawah rezim Soeharto berawal dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk membersihkan para jenderal Angkatan Darat yang tergabung dalam sebutan Dewan Jendral yang dinilai mengancam kekuasaan Soekarno. Peristiwa ini ditandai dengan penculikan dan pembunuhan 6 Jendral yaitu; Letjen. A. Yani, Mayjen Soeprapto, Mayjen. S. Parman, Mayjen Haryono MT, Brigjen. Soetojo S, dan Brigjen. DI Panjaitan, sementara Jend. AH. Nasution yang juga merupakan target mereka berhasil lolos. Lihat Buku Merah Putih, terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia, *G 30 S Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasan*, (Jakarta: Setneg, 1994), h. 61.

¹³Salah satu upaya pemerintah dalam mempertahankan status quo-nya adalah dengan meleburkan partai-partai politik dalam tiga partai; PPP, Golkar dan PDI. Selain itu, dwi fungsi ABRI disinyalir merupakan upaya Pemerintah dalam memperkuat basisnya untuk melakukan tekanan terhadap para lawan politiknya. Lihat, Rusli Karim M, *Negara dan Peminggiran Islam Politik, Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan Bagi Keberadaan Islam Politik di Indonesia Era 1970-an dan 1980-an*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, cet. I, 1999), h.118.

¹⁴Pasang surut tersebut dapat terlihat pada; masa awal Orde Baru terlihat gairah hidup keagamaan di masyarakat meningkat, karena pada masa sebelumnya (Orde Lama) sikap pemerintah terhadap umat Islam cenderung diskriminatif. Kemudian harmonisasi hubungan pemerintah yang baru (Orde Baru) dengan umat Islam merenggang. Hal ini ditandai dengan beberapa peristiwa; 1) pembubaran partai-partai Islam, 2) pemberlakuan asas tunggal, 3) terjadi kasus-kasus "pembantaian" umat Islam, seperti peristiwa Tanjung Priok, Jama'ah Warsidi (Lampung), dan Isu Komando Jihad; 4) tekanan terhadap tokoh-tokoh Islam, seperti yang dialami oleh AM Fatwa dan HR Darsono. Keadaan ini berlangsung cukup lama hingga pada tahun 1988-an, hubungan Pemerintah dengan umat Islam membaik, hal ini terlihat pada; 1) Undang-Undang Sisdiknas tahun 1989 yang mewajibkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib pada setiap jenjang pendidikan negeri atau swasta, umum atau keagamaan; 2) Undang-Undang Peradilan yang memuat pemberlakuan hukum Islam pada masalah perkawinan, warisan, waqaf, hibah, dan sedekah; 3) Undang-Undang Perbankan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia yang menjalankan prinsip-prinsip perbankan Islam; 4) penghapusan larangan mengenakan jilbab pada para siswa putri; 4) penghapusan judi SDBS; 5) berdirinya ICMI; 6) Imtak sebagai landasan pembangunan. Lihat ; Hartono Marjono, *Politik Indonesia (1996-2003)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 29-55.

¹⁵Salah satu bentuk konflik yang terjadi yang bermula dari kegiatan majelis Ta'lim adalah peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada, Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa, Geanologi Intelegensia Muslim Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 4-12

dakwah, potensi konflik muncul ketika berdialog dengan kepentingan agama, sekte dan politik. Hal tersebut tampak ketika Majelis Ta'lim menjadi sarana penyebaran paham-paham madzhab atau golongan. Di sisi lain, organisasi politik juga memanfaatkan Majelis Ta'lim sebagai sarana pembentukan opini publik.¹⁶ Demikian juga pemerintah sendiri mempunyai kepentingan dalam proses sosialisasi program-programnya. Sementara dalam aspek pendidikan, Majelis Ta'lim juga menjadi sarana dalam pelestarian tradisi akademis melalui kajian-kajian keagamaan yang diselenggarakan oleh kalangan umat Islam.

Pembahasan

1. Majelis Ta'lim dan Politik Penguasa Orde Baru

Pada bagian ini, penulis menyetengahkan tentang dinamika Majelis Ta'lim dalam pergolakan politik yang terjadi pada masa Orde Baru. Hal ini dirasa perlu, untuk mengetahui bagaimana peranan Majelis Ta'lim dalam pergolakan politik yang terjadi pada masa Orde Baru. Kemudian penulis menjelaskan fenomena Majelis Ta'lim dalam pergolakan politik pada masa Orde Baru dengan varian-varian yang ada. Dalam hal ini penulis mendiskripsikan fenomena Majelis Ta'lim yang pro terhadap pemerintah Orde Baru, kontra terhadap pemerintah Orde Baru, maupun yang bersikap netral. Pengelompokan ini didasarkan pada sikap Majelis Ta'lim tersebut dalam pergolakan politik yang terjadi pada tahun 1978 hingga pada tahun 1985. Hal ini didasarkan bahwa pada masa-masa tersebut terjadi sosialisasi asas tunggal yang menjadi tonggak sejarah pergerakan Islam.

Secara umum pertumbuhan dan perkembangan Majelis Ta'lim dan lembaga pendidikan Islam lainnya cukup baik. Hal ini tampak dari munculnya kegiatan-kegiatan pengajian baik yang diselenggarakan oleh organisasi sosial kemasyarakatan maupun oleh pemerintah sendiri. Namun demikian hubungan akomodatif pemerintah Orde Baru terhadap geliat kegiatan keagamaan umat Islam pada periode-periode awal masa Orde Baru sempat mengalami ketegangan yakni pada tahun 1968 hingga 1980-an. Sementara, pada masa-masa berikutnya,

¹⁶Majelis Ta'lim merupakan sarana komunikasi massa yang cukup efektif untuk mensosialisasikan ide-ide ataupun gagasan dalam upaya pembentukan opini publik. Lihat keterkaitannya dalam pembentukan opini publik; Von Der Mehdem, *Politics of Developing Nations*, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc Englewood, t.t.), h. 70.

kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan Islam, termasuk Majelis Ta'lim, bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir, 1980-an – 1990-an. Hal ini dimungkinkan karena tekad Orde Baru yang sangat kuat untuk mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Di samping itu juga karena pendekatan politik Orde baru yang akomodatif dalam menghadapi kepentingan aspirasi umat Islam Indonesia.¹⁷

Di sisi lain, hubungan Islam dengan pemerintah Orde Baru mengalami pergeseran, hal ini dimungkinkan karena format politik Orde Baru yang pragmatis. Dalam konteks ini kekuatan-kekuatan yang berorientasi politik secara berlebihan –khususnya dari kalangan Islam– mendapat tekanan (represi) dengan pertimbangan keamanan. Tekad Orde Baru sendiri lebih ditujukan pada usaha pembangunan dalam pengertian ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan formasi politik seperti itu, pemerintahan Orde Baru dapat menangkal sekaligus gerakan-gerakan politik Islam yang dikhawatirkan muncul –sebagaimana sudah pernah muncul pada masa Orde Lama. Orde baru memberikan perhatian yang sangat serius dalam menekan kemungkinan munculnya radikalisme Islam traumatik yang memperjuangkan pembentukan negara Islam sebagaimana dilakukan oleh Pemberontakan DI/TII, Gerakan Ibnu Hajar, Pemberontakan Batalyon 426 Jawa Tengah, dan Peristiwa Aceh Merdeka.¹⁸

Di samping menyangkut masalah-masalah politik, ketegangan hubungan Islam dan negara pada periode awal Orde Baru juga muncul dalam kasus-kasus yang bersinggungan langsung dengan masalah keagamaan dan pendidikan agama. Pada masa itu, terdapat kesan yang cukup kuat bahwa kebijakan pemerintah sangat dominan diwarnai oleh kepentingan anti-Islam, baik melalui lobi-lobi

¹⁷Politik akomodasi Orde Baru dilakukan dalam konteks pembangunan di luar bidang politik. Dalam bidang terakhir ini, pemerintah memberlakukan pendekatan keamanan yang tidak memberikan peluang bagi berkembangnya partai-partai Islam. Namun demikian, kekuatan-kekuatan umat Islam tetap dipandang penting dan dimanfaatkan melalui institusi-institusi yang bebas dari muatan politik Islam. Bersamaan dengan itu, di kalangan umat Islam sendiri berkembang kesadaran baru bahwa apa yang disebut dengan politik Islam sesungguhnya tidak ada kecuali dalam pengertian bahwa Islam menyediakan dasar-dasar moral bagi pengembangan politik bangsa. Lihat Fachry Ali dan Bachtiar Effendy, *Merambah jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1986) dan Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara, dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

¹⁸Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1974), h. 172.

maupun melalui perjuangan langsung di lembaga dan forum resmi. Dalam Sidang Umum MPR-RI 1973, misalnya terjadi ketegangan yang cukup serius ketika membahas materi Garis-Garis Besar Haluan negara (GBHN) khususnya menyangkut isu yang sangat jelas menunjukkan kebijakan anti-Islam. Meskipun tidak sempat dibawa pada forum persidangan resmi, tetapi dalam draf GBHN itu terdapat rancangan-rancangan yang mengundang reaksi umat Islam, antara lain tentang rencana penggantian mata pelajaran agama dengan Pendidikan Moral Pancasila, menurunkan Anggaran Belanja Negara 1973/1974 untuk urusan-urusan agama hampir sebanyak lebih dari 30 % dari Rp. 1.226 juta menjadi Rp. 800 juta, dan penetapan Aliran Kepercayaan dalam GBHN sebagai bagian dari agama resmi yang memiliki kedudukan sama dengan agama-agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.¹⁹

Dalam bidang pendidikan, ketegangan antara aspirasi ummat Islam dengan kebijakan pemerintah muncul terutama menyangkut usaha yang melemahkan posisi bidang studi pendidikan agama di sekolah-sekolah. Sejalan dengan kekuatan politik dari kalangan penganut aliran kepercayaan, pemerintah memberikan porsi yang sangat dominan pada bidang studi Pendidikan Moral Pancasila. Kebijakan ini selanjutnya mengarah pada privatisasi agama- dengan pengertian bahwa agama merupakan masalah pribadi- sehingga institusi tidak terlibat secara langsung dalam masalah-masalah pembinaan keimanan siswa. Dalam hal ini pernah direncanakan penggantian mata pelajaran agama dengan mata pelajaran Panca Agama dengan alasan untuk pembinaan nalar dan wawasan siswa dalam memahami agama.²⁰

Salah satu usaha melemahkan pendidikan agama, khususnya bagi umat Islam, adalah menutup setiap kesempatan yang mengarah kepada pembinaan dan peningkatan pengamalan keagamaan siswa. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat keagamaan cenderung dibatasi, termasuk kesempatan untuk mengenakan kerudung bagi para siswa Muslimah. Dalam banyak kasus kepala sekolah sering mengeluarkan siswi-siswi Muslimah karena alasan mengenakan

¹⁹Thaba, *Islam dan Negara*, h. 253.

²⁰Uraian umum mengenai kebijakan pemerintah khususnya pada masa kementerian Daoed Yoesoef dalam hal pendidikan agama. Lihat Daliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 77-81.

kerudung (jilbab).²¹ Para siswa-siswi Muslimah juga tidak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam organisasi-organisasi pelajar Islam dengan alasan OSIS adalah satu-satunya organisasi siswa.²²

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai diskriminatif terhadap kepentingan umat Islam, bagi sebagian tokoh-tokoh Islam harus ditentang. Dalam hal ini forum-forum Majelis Ta'lim sering digunakan untuk menyatakan penolakan dan kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Sementara para tokoh-tokoh Islam yang gencar mengkritisi kebijakan pemerintah adalah mereka yang pernah aktif dalam aktifitas politik Islam pada masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu pemerintah memandang bahwa upaya yang dilakukan oleh sebagian tokoh-tokoh umat Islam tersebut sebagai tindakan provokatif kepada masyarakat yang disinyalir mengancam ketertiban dan keamanan.

Dengan demikian Majelis Ta'lim pada masa Orde Baru memiliki arti tersendiri, mengingat pada periode ini Majelis Ta'lim menjadi akar konflik kepentingan antara pemerintah dan politik Islam. Pemerintah memandang bahwa Majelis Ta'lim cenderung dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan kelompok politik Islam yang dinilai mengancam stabilitas keamanan dan ketentraman karena forum Majelis Ta'lim digunakan sebagai sarana agitasi politik. Sementara bagi kelompok politik Islam memanfaatkan sarana Majelis Ta'lim untuk ajang *amar ma'ruf nahi munkar* (memerintahkan kebaikan dan melarang pada perbuatan kemunkaran). Hal ini didasarkan pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai mendiskreditkan umat Islam dianggap sebagai sebuah kemunkaran yang harus ditentang.²³ Pada masa-masa akhir Orde Baru, hubungan akomodatif

²¹Para Kepala Sekolah melakukan itu berdasarkan peraturan mengenai Pakaian Seragam Sekolah berupa Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah No. 052/C/Kep/D.82 tanggal 17 Maret 1982. Berdasarkan keputusan itu, pakaian kerudung tidak termasuk dalam ketentuan seragam sekolah. Pada periode selanjutnya, periode hubungan baik, MUI berhasil melakukan pendekatan dengan Depdikbud dan keluarlah Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Dikbud No. 100/c/Kep/D/1991 yang merupakan penyempurnaan dari keputusan tahun 1982 tadi. Pada keputusan yang terakhir ini pakaian jenis jilbab diperkenankan, sesuai Pasal 10 Ayat 2. Koperasi Pegawai Kanwil Dikbud Jawa Barat, *Himpunan Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Kesiswaan*, (Bandung: Koperasi Pegawai Kanwil Dikbud Jawa Barat, 1997), h. 97-111.

²²Berdasarkan Keputusan Dirjen Dasmen No. 091/C/Kep/O.80 tanggal 9 Juni 1980 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan.

²³Beberapa contoh kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru yang dinilai mencederai kepentingan umat Islam antara lain; 1) Pembangunan yang sangat pragmatis tanpa memperhitungkan norma-norma ajaran agama Islam seperti legalisasi SDSB (Sumbangan Dana

pemerintah terhadap kepentingan umat Islam²⁴ melahirkan perkembangan yang cukup signifikan bagi pertumbuhan Majelis Ta'lim di Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Ta'lim pada masa itu terpola pada tiga sikap yang berbeda terhadap pemerintahan Orde Baru, yakni 1) sikap pro terhadap pemerintah; 2) sikap kontra terhadap pemerintah; dan 3) sikap netral terhadap pemerintah.

Sikap Majelis Ta'lim dengan dikelompokkan tiga varian yang berbeda tersebut didasarkan pada; 1) sikap politik tokoh Majelis Ta'lim terhadap pemerintah; 2) struktur kelembagaan Majelis Ta'lim yang dapat saja dibentuk oleh organisasi *underbow* dari pemerintah Orde Baru; 3) sikap politik peserta/jama'ah Majelis Ta'lim terhadap pemerintah Orde Baru.

Tokoh Majelis Ta'lim dalam hal ini, penulis kategorikan pada pendiri, penceramah, maupun orang-orang yang terlibat secara aktif terhadap aktifitas kegiatan Majelis Ta'lim. Sikap politik yang dimunculkan oleh para tokoh ini, secara tidak langsung merupakan cerminan dari sikap Majelis Ta'lim yang dikelolanya. Oleh karena itu, Majelis Ta'lim cenderung dikelola dan diarahkan oleh tokoh-tokoh tersebut untuk kepentingan-kepentingan mereka.

Sedangkan dalam struktur kelembagaan Majelis Ta'lim, dapat saja dibentuk oleh organisasi-organisasi yang memiliki visi dan misi tertentu, terutama jika Majelis Ta'lim tersebut dibentuk oleh organisasi *underbow* suatu partai politik. Oleh karenanya aktivitas dalam kegiatan Majelis Ta'lim ini, memiliki sikap-sikap politik yang menjadi landasan dari visi dan misi yang diembannya.

Adapun sikap politik peserta/jama'ah Majelis Ta'lim, biasanya akan terpola sesuai dengan aktifitas kegiatan dari Majelis Ta'lim yang diikutinya. Meskipun hal ini memiliki kecenderungan yang bersifat subyektif. Karena

Sosial Berhadiah), suatu bentuk penggalangan dana sosial dengan prinsip-prinsip judi yang bertahan sampai 15 tahun di bawah kementerian Departemen Sosial; 2) Larangan dan intimidasi terhadap para siswa berjilbab di sekolah-sekolah milik pemerintah, berdasarkan PP No. 052/C/Kep/D.82 tanggal 17 Maret 1982, 3) Program Keluarga Berencana yang tidak memperhatikan ajaran Islam. Menurut Vatikiotis, KB ini adalah kesepakatan orang Kristen untuk mengurangi jumlah orang Islam; dan lain-lain. Lihat, M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, (Jakarta: PT. Hanindra, 1985), h. 119-120.

²⁴Beberapa contoh sikap akomodatif tersebut antara lain; 1) didirikannya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YABMP) pada tanggal 17 Februari 1982, yang dilatarbelakangi kebutuhan dana untuk pembangunan masjid-masjid di seluruh pelosok tanah air; 2) Pengiriman da'i ke daerah transmigran yang terpencil; 3) Pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1990 di Cisarua Bogor; dan lain-lain, lihat; Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), h. 273.

kemungkinan dapat saja terjadi, meskipun seseorang aktif mengikuti suatu kegiatan Majelis Ta'lim yang memiliki visi dan misi tertentu, tetapi ia memiliki sikap politik yang berbeda.

a. Pro Pemerintah

Terbentuknya Golongan Karya sebagai salah satu kontestan Pemilu pada masa-masa awal Orde Baru merupakan strategi Pemerintahan Soeharto untuk dapat tetap mempertahankan kekuasaannya.²⁵ Kelahiran Golkar (20 Oktober 1964) merupakan reaksi dan repon terhadap situasi politik dalam negeri yang kacau balau. Situasi yang tidak menguntungkan bangsa dan negara, karena tidak terjaminnya keamanan akibat ulah para pengacau (partai politik) dan konflik politik di dunia kepartaian, mengundang pemikiran pemerintah untuk mendayagunakan ABRI guna mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan Undang-Undang.²⁶ Pendayagunaan ABRI dalam menetralsir kehidupan berbangsa dan bernegara yang tengah mengalami kegoncangan tersebut, dirasa tidak akan mungkin terwujud tanpa peran serta masyarakat. Untuk itu ABRI merasa perlu mengajak kelompok-kelompok yang tidak berafiliasi pada partai politik (yang sering disebut dengan Golongan Fungsional, seperti guru, nelayan, petani, tentara, ulama, ilmuwan, polisi), untuk bersama-sama memikirkan dan melaksanakan tugas tersebut.²⁷

Meskipun Golkar (Golongan Karya) tidak menyebut dirinya sebagai partai, namun keterlibatannya dalam pemilihan umum merupakan bukti bahwa kehadirannya mempunyai kepentingan politik untuk mendukung pemerintah Orde Baru. Sebagai organisasi kekartayuan yang merangkum kelompok-kelompok militer, agama, pemuda, buruh, pengusaha dan kelompok-kelompok non-ideologis lainnya merupakan upaya perlawanan terhadap dua kelompok politik baik Islam maupun nasionalis.

Kemenangan mutlak Golkar pada pemilu tahun 1971 dengan mengantongi suara hingga 73 persen, mempunyai indikasi pemerintah untuk membantu Golkar memenangi pemilu melalui persiapan dan strategi yang efektif.²⁸ Dari fakta

²⁵Lihat Din Syamsuddin, *Islam dan Politik*, h. 40.

²⁶Sofjan Lubis, *et.al.*, *30 Tahun GOLKAR*, (Jakarta: DPP Golkar, 1994), h. 95.

²⁷*Ibid.*

²⁸Din Syamsuddin, *Islam dan Politik*, h. 40.

tersebut, tampak bahwa pembentukan Golkar sangat terkait erat dengan agenda pemerintah Orde Baru dalam upaya memperkuat hegemoninya. Hubungan saling menguatkan ini disinyalir karena adanya kepentingan antara satu dengan lainnya. Pemerintah membantu Golkar untuk memenangi pemilu dengan bantuan-bantuan finansial, sementara Golkar membantu pemerintah dengan basis dukungan massa yang cukup signifikan.

Selain itu, keterlibatan Pemerintah Orde Baru dalam membantu kepentingan Golkarpun menjadi faktor kemenangan Golkar dalam setiap pemilu pada masa Orde Baru. Upaya yang dilakukan oleh Golkar dalam merangkul umat Islam di Indonesia salah satunya ialah dengan membentuk organisasi sayap yang mengakomodir kepentingan umat Islam, salah satunya dengan membentuk kegiatan Majelis Ta'lim Al-Hidayah dan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI). Beberapa alasan pengelompokkan Majelis Ta'lim yang bersikap pro pemerintah Orde Baru didasarkan kepada beberapa asumsi; 1) secara struktural lembaga tersebut mempunyai hubungan dengan Pemerintah Orde Baru atau partai pendukung Orde Baru (Golkar); 2) secara fungsional, para tokoh-tokoh Majelis Ta'lim tersebut mempunyai hubungan struktural maupun emosional dengan pemerintah Orde Baru; 3) adanya sikap akomodatif dan support pemerintah terhadap eksistensi Majelis Ta'lim tersebut. Adapun beberapa Majelis Ta'lim yang mempunyai kecenderungan pro terhadap pemerintah Orde Baru antara lain;

- 1) Majelis Ta'lim Al-Hidayah.²⁹
- 2) KODI (Koordinasi Dakwah Islam).³⁰
- 3) Majelis Ta'lim Kwitang.³¹
- 4) BKMT (Badan Kontak Majelis Ta'lim).³²

²⁹Lihat dalam Abdul Azis Thaba, *Islam dan negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1996) dan Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: Logos, 2003).

³⁰Lihat dalam Azhari Baedlawi, *Profil KODI*, Edisi April, (Jakarta: Dialog KODI, 2003).

³¹Lihat Abdul Qadir Umar Mauladdawillah, *Tiga Serangkai Ulama Tanah Betawi*, (Jakarta: Pustaka Basma, 1995). Bandingkan, Alwi Shahab, *Majelis Ta'lim Kwitang di Masa Jepang*, <http://www.muslimdelft.nl/titian-ilmu/sejarah-islam/majelistaklim-habib-kwitangs-taklim-kwitang-di-masa-jepang/>, di akses tanggal 8 Juli 2015. Lihat juga Alwi Shahab, *Majelis Ta'lim Kwitang di masa Jepang*. <http://www.muslimdelft.nl/titian-ilmu/sejarah-islam/majelis-taklim-habib-kwitang-taklim-kwitang-dimasa-jepang/>, di akses tanggal 9 Juli 2015.

³²Lebih lanjut mengenai BKMT dapat dibaca di dalam Tutty AS Alawiyah, *KH. Abdullah Syafi'ie; Pribadi, Visi dan Derap Perjuangannya*, dalam Tutty Alawiyah AS (ed), *KH. Abdullah Syafi'ie*. (Jakarta: Perguruan Islam As-Syafi'iyah, 1999).

b. Kontra Pemerintah

Sikap kontra terhadap pemerintah ini, penulis deskripsikan dari; 1) sikap-sikap politis para tokoh maupun jama'ah Majelis Ta'lim yang cenderung tidak setuju terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah; 2) para tokoh-tokoh Majelis Ta'lim mempunyai pandangan ideologi yang berbeda-jika tidak disebut berseberangan dengan ideologi penguasa Orde Baru, dalam hal ini ideologi Pancasila; 3) sikap depresif pemerintah terhadap Majelis Ta'lim tersebut. Setidaknya penulis dapat mengelompokkan Majelis Ta'lim yang cenderung bertentangan dengan Pemerintah Orde Baru pada dua kelompok besar, meskipun tidak menutup kemungkinan masih terdapat contoh-contoh yang lain. Dua contoh Majelis Ta'lim tersebut adalah;

- 1) Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).³³
- 2) Pengajian Usrah.³⁴

c. Netral

Pengelompokkan Majelis Ta'lim pada posisi netral secara politik pada masa Orde Baru ini didasarkan setidaknya pada beberapa hal; 1) pandangan politik tokoh-tokoh Majelis Ta'lim yang bersangkutan terhadap pemerintah Orde Baru yang tidak peduli dengan urusan politik; 2) sikap politik para peserta jama'ah Majelis Ta'lim yang mempunyai latarbelakang afiliasi politik yang beragam; 3) meteri kajian Majelis Ta'lim yang cenderung tidak mengangkat isu-isu politik dan lebih menekankan pada aspek peningkatan pemahaman keagamaan.

Untuk mendapatkan salah satu contoh Majelis Ta'lim yang tidak bersikap netral terhadap konflik antara penguasa Orde Baru dengan lawan politiknya, cukup sulit. Hal ini dikarenakan dengan gencarnya pemerintah Orde Baru dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada Majelis Ta'lim yang memiliki massa yang cukup besar. Adapun Majelis Ta'lim yang memiliki basis massa yang

³³Lihat dalam Lukman Hakim, *70 Tahun H. Buchari Tamam: Menjawab Panggilan Risalah*, (Jakarta: Media Dakwah, 1992).

³⁴Lihat dalam Abdul Syukur, *Gerakan Usroh di Indonesia: Kasus Peristiwa Lampung 1989, Tesis*, (Jakarta: UI, 2001). Lihat juga dalam Al Chaidar dan Tim Peduli Tapol Amnesti Internasional, *Bencana Kaum Muslimin Indonesia 1980-2000*, (Yogyakarta: Adipura, 2000). Lihat Nurhayati Djamas, *Gerakan Kaum Muda Islam Masjid Salman, dalam Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta ; Pustaka Firdaus, 1996).

sedikit, tidak menarik perhatian pemerintah untuk mendekatinya. Salah satu contoh yang bisa didapatkan adalah kegiatan Majelis Ta'lim pimpinan Syafi'i Hadzami dengan Badan Musyawarah Majelis Ta'lim (BMMT), meskipun tidak menutup kemungkinan adanya majelis-Majelis Ta'lim semisal, seperti mejelis-Majelis Ta'lim gedongan dan yang diselenggarakan dihotel-hotel atau dikantor-kantor yang memiliki basis massa yang relatif sedikit dan tidak berorientasi kepada gerakan politik.

Pengelompokan BMMT pada posisi netral terhadap pemerintah Orde Baru didasarkan pada; 1) materi penyampaian dalam kegiatan Majelis Ta'lim-nya lebih bersifat kajian keagamaan yang menfokuskan pada pengajian kitab-kitab; 2) afiliasi politik para jama'ah Majelis Ta'lim yang dikelola oleh BMMT terdiri dari kalangan homogen; adakalanya merupakan basis massa Partai Persatuan Pembangunan maupun basis massa Golkar³⁵; 3) sikap politik tokoh BMMT (KH. Syafi'i Hadzami), meskipun beliau merupakan tokoh di kalangan massa PPP, namun tidak menghalanginya untuk merangkul semua ummat.

Sosok KH. M. Syafi'i Hadzami, merupakan salah satu produk dari keberadaan Majelis Ta'lim di Jakarta. Mengingat keulamaannya merupakan hasil didikan ulama lokal dan habaib Betawi. Pendidikan pertama beliau diperoleh dari Kakeknya, Husin. Kemudian ketika beranjak dewasa, beliau mengaji dari satu ulama Betawi ke ulama Betawi lainnya. Tokoh-tokoh ulama yang sempat menjadi guru beliau antara lain: KH. Sa'idan (Kemayoran), Ya'qub Sa'idi (Kebon Sirih), Guru Khalid (Gondangdia), Guru Abdul Majid (Pekojan), KH. Mahmud Romli (Menteng), KH. Mukhtar Muhammad (Kebon Sirih), KH. Muhammad Sholeh Mushonnif, KH. Zahrudin Utsman, Syekh Yasin bin Isa Al Fadani dan Muhammad Thoha.

Sementara dari lingkungan Habaib, beliau belajar kepada Habib Ali bin Husen al Aththas, Habib Ali Bungur, dan Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi. Sebagai seorang ulama hasil produksi pendidikan Majelis Ta'lim di Betawi, KH. Syafi'i Hadzami memberikan arti tersendiri bagi keberadaan Majelis Ta'lim di tanah Betawi. Keberhasilan majelis-Majelis Ta'lim di Betawi dalam mencetak

³⁵Muhammad Syafi'i Hadzami, *Sumur Yang Tak Pernah Kering*, (Jakarta: Yayasan Al 'Asyrotussyafi'iyah, cet. 1, 1999), h. 10.

ulama, menurut KH. Drs. Saifuddin Amsir paling tidak disebabkan oleh dua hal; yaitu, *pertama*, tidak adanya batasan waktu, seperti SKS di perguruan tinggi, untuk menyelesaikan satu disiplin ilmu atau satu kitab; *kedua*, anak didik atau murid mempunyai kebebasan waktu dan kesempatan untuk menanyakan dan menyelesaikan pelajaran yang tidak ia pahami kepada gurunya; dan *ketiga*, anak didik atau murid langsung dihadapkan dengan kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat. hasilnya, dalam beberapa kesempatan telah teruji bahwa lulusan Majelis Ta'lim memiliki pemahaman ilmu agama yang lebih mendalam dari pada lulusan perguruan tinggi Islam. Bahkan menurutnya, tidak sedikit para sarjana bidang Islam yang bergelar doktor dan profesor menjadikan lulusan Majelis Ta'lim sebagai tempat bertanya tentang masalah-masalah yang pelik di bidang keislaman.³⁶

Argumentasi Saifuddin Amsir tersebut cukup beralasan jika melihat materi-materi kitab yang diajarkan pada forum-forum Majelis Ta'lim yang merupakan kitab-kitab klasik yang tidak diajarkan pada perguruan tinggi. Kitab-kitab tersebut antara lain; *Hidâyah al Atqiyâ'*, *Syarh al Hikâm*, *Kifâyah al Hidâyah al Atqiyâ'*, *Anwâr Masâlalik*, *Tanbih al Mughtârrîn*. Kesemua itu merupakan kitab *tashawur*. Sementara untuk kitab Fiqh antara lain dikaji; *Sab'ah Kutub Mufîdah*, *Fath al Mu'în*, *Bidâyah al Mujtahid*; sedangkan untuk kitab Hadits antara lain; *Riyâdh al Shâlihîn*, *Shohîh Buchâri*, *Shohîh Muslim*; *Nailu al Authâr*; sedangkan kitab tafsir yang digunakan antara lain; *Tafsîr Ibn al Katsîr*, *Tafsîr al Nasâfi*; *Al Itqân fî Ulûmi al Qur'ân*; untuk kitab sejarah digunakan kitab; *tarikh Muhammad*, *Nûr al Yaqîn*, dan lain-lain.³⁷

Sementara itu, selain mengajarkan ilmunya melalui kegiatan Majelis Ta'lim, beliau juga menghasilkan karya-karya tulis, antara lain¹⁰²; 1) *Sulâmu al`Arsy fî Qirâ`at al Warsy*; 2) *Qiyâs `Adâlah al Hujjah al Syar`iyyah*; 3) *Qabliyah al Jum`ah*; 4) *Shalâtu al Tarâwih*. 5) *`Ujâlah Fidyah al Shalâh*. 6) *Mathmah al Rubâ' fî Ma`rifah al-Ribâ* 7) *Al Hujaju al Bayyinah*.³⁸

³⁶Lihat dalam <http://www.islamic-centre.or.id/component/content/article/31-kajian/175-peran-majlistaklim-di-betawi/>. Di unduh pada tanggal 9 Juli 2015.

³⁷*Ibid.*

³⁸Hadzami, *Sumur*, h. 30.

Salah satu kitab yang menjadi *masterpiece* beliau adalah *Taudhih al Adillah*. Kitab ini menjadi rujukan untuk menjawab persoalan-persoalan fiqh kontemporer, yang berisi tanya jawab beliau saat menjadi nara sumber di Radio Cendrawasih. Kehadiran BMMT merupakan perwujudan untuk mengkoordinasi Majelis-majelis Ta'lim tempat Syafi'i Hadzami mengajar. Ide berdirinya BMMT ini datang dari Syafi' Hadzami sendiri. Badan ini dibentuk setelah memperhatikan kesungguhan dan ketekunan para jama'ah majelis-Majelis Ta'lim dalam menuntut ilmu. Dalam musyawarah susunan pengurus yang diadakan pada tanggal 7 April 1963 BMMT ini diberi nama Al-'Asyirotusyafi'iyah.³⁹

Badan musyawarah Majelis Ta'lim Al-'Asyirotusyafi'iyah semakin hari semakin berkembang. Maka dalam rangka melancarkan program dan usahanya di bidang sosial, pendidikan/pengajaran para pengurus merasa sangat perlu untuk meningkatkan organisasinya menjadi badan hukum dalam bentuk yayasan. Para penguruspun sepakat untuk melakukan musyawarah untuk persiapan yang diperlukan organisasinya menjadi yayasan. Tepat pada tahun 1975 dengan akte notaris M.S. Tadjoen no. 228 tertanggal 30 Juni 1975, terbentuklah suatu yayasan yang bernama yayasan BMMT Al-'Asyirotusyafi'iyah dengan ketua umumnya KH. Muhammad Syafi'i Hadzami.⁴⁰

Dalam bidang sosial yayasan BMMT Al-'Asyirotusyafi'iyah lebih menggiatkan para jama'ah Majelis Ta'lim dalam pembinaan mental dan gotong royong di segala bidang kehidupan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sedangkan dalam bidang pendidikan Yayasan BMMT Al-'Asyirotusyafi'iyah mempunyai cita-cita melalui tiga jalan usaha;

1. Melalui majelis-Majelis Ta'lim, yayasan memberikan penyuluhan secara lisan maupun tulisan bagi jama'ah Majelis Ta'lim pada khususnya dan warga ibukota umumnya kearah kemajuan dan pengetahuan ilmu agama Islam dan pengembangan jiwa ibadah.
2. Melalui penyelenggaraan kursus-kursus yang intensif dan terarah, berusaha secepatnya untuk dapat mencetak sebanyak mungkin guru-guru

³⁹*Ibid.*, h. 8.

⁴⁰*Ibid.*, h. 166.

agama, muballigh dan lainnya, pria maupun wanita, untuk dapat mengisi kekurangan.

3. Penyelenggaraan pendidikan pesantren, berusaha untuk membangun generasi muda Islam melalui penyediaan fasilitas ruang kehidupan belajar untuk para pemuda dan pemudi Islam dididik menjadi penerus para ulama yang dinamis dan militan untuk membangun masyarakat Ibukota yang beragama.⁴¹

Dalam kiprah dakwahnya KH. Abdullah Syafe'i Hadzami memiliki peranan besar dalam dakwah dan pendidikan di lingkungan Majelis Ta'lim di Jakarta, mengingat KH. Syafi'i Hadzami merupakan da'i yang disegani oleh jama'ahnya. Bahkan dari kegiatan Majelis Ta'lim yang semakin terorganisir melalui BMMT, pada masa-masa berikutnya terbentuklah lembaga pendidikan Al-'Asyirotusyafi'iyah yang menyelenggarakan pendidikan non formal dan formal. Non formal seperti, TPA dan Pesantren Al Arbain. Sementara pendidikan formalnya berbentuk TK hingga tingkat Aliyah.⁴²

Sementara yang mengikuti majelis ilmu Syafi'i Hadzami di berbagai Majelis Ta'lim berasal dari golongan usia yang berbeda. Begitu juga di suatu daerah biasanya bukan hanya orang-orang daerah itu sendiri, melainkan banyak juga dari daerah lain. pemandangan yang menarik untuk dilihat adalah, para murid-murid Syafi'i Hadzami bukan hanya dari masyarakat biasa, namun majelisnya banyak dihadiri oleh para kiai, para ustadz, dan dosen-dosen yang mengaji kepada Syafi'i Hadzami. Bahkan adapula yang alumni pondok pesantren atau yang menuntut ilmu di Timur Tengah. Heterogenitas jamaah Majelis Ta'lim beliau baik dari kalangan organisasi yang berbeda, partai yang berbeda, sosial ekonomi yang berbeda, menunjukkan sikap toleransi KH. Syafi'i Hadzami dalam melayani kebutuhan umat dalam hal agama. Meskipun beliau aktif di salah satu partai (PPP), namun kerendahan hati dan keramahannya tidak menjadi jurang pemisah dengan ulama-ulama lain yang berjuang melalui partai yang berbeda.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka kiprah dakwah yang dikembangkan oleh Abdullah Syafi'i Hadzami, tidak memiliki tujuan-tujuan

⁴¹*Ibid.*, h. 125.

⁴²[http://www.islamic-centre.or.id/data/KH.M.Syafi'iHadzami /](http://www.islamic-centre.or.id/data/KH.M.Syafi'iHadzami/), diakses tanggal 4 Juli 2015.

politis yang bernuansa mendukung pemerintah Orde Baru atau menentanginya. terlebih lagi, dari materi-materi pengajian yang disampaikan berkisar kepada masalah-masalah pembahasan kitab kuning.

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa fenomena Majelis Ta'lim pada masa Orde Baru memiliki beragam kepentingan. Baik kepentingan pemerintah, oposisinya maupun independensi keilmuan. Kepentingan pemerintah melalui mesin politiknya, Golkar, membangun konstituennya melalui Majelis Ta'lim dengan cara; 1) membentuk Majelis Dakwah Islamiyah dan Majelis Ta'lim Al-Hidayah, untuk merangkul basis massa Islam; 2) melakukan pendekatan-pendekatan terhadap majelis-Majelis Ta'lim yang telah berakar kuat di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan fasilitas dan kemudahan sebagai upaya merangkul dukungan agar tetap eksis dalam kancah politik di Indonesia; 3) melalui jalur birokrasi, dibentuklah KODI untuk menetralsir kemungkinan munculnya penyalahgunaan forum Majelis Ta'lim sebagai media politik praktis, dengan program-program pembinaan dan pengkaderan da'i.

Sementara di sisi lain, masih terdapat kelompok-kelompok massa yang memanfaatkan sarana Majelis Ta'lim untuk kepentingan politik maupun kepentingan golongannya. Seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik Islam yang memanfaatkan forum Majelis Ta'lim untuk melakukan agitasi politik dalam mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu, munculnya kelompok-kelompok jama'ah usrah yang mempunyai ideologi berbeda dalam mentafsirkan arti kepemimpinan umat, sehingga kegiatan mereka dinilai menimbulkan dampak kerawanan di tengah-tengah masyarakat.

Forum Majelis Ta'lim yang tidak sepi dari berbagai macam kepentingan tersebut, tidak berarti menisbikan keberadaan Majelis Ta'lim yang murni melakukan aktivitasnya tanpa unsur-unsur politik. Seperti yang dilakukan oleh Syafi'i Hadzami dengan BMMT-nya, yang memfokuskan kajian Majelis Ta'limnya pada khasanah keilmuan dan peningkatan keimanan dan ketakwaan.

2. Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta'lim

Masa Orde Baru berlangsung selama 32 tahun sejak runtuhnya rezim Soekarno dan naiknya rezim Soeharto pada tahun 1966 sampai runtuhnya kembali

rezim Soeharto oleh gelombang reformasi pada tahun 1998. Peralihan dari Orde Lama di bawah rezim Soekarno ke Orde baru di bawah rezim Soeharto berawal dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilancarkan oleh partai Komunis Indonesia (PKI)⁴³ untuk membersihkan para Jenderal Angkatan Darat yang tergabung dalam sebutan ‘Dewan Jenderal’ yang dinilai mengancam kekuasaan Soekarno. Peristiwa ini ditandai dengan penculikan dan pembunuhan 6 jenderal yaitu Letjen. A. Yani, Mayjen Soeprapto, Mayjen. S. Parman, Mayjen Haryono MT, Brigjen Soetojo S., dan Brigjen. DI. Panjaitan, sementara Jend. AH. Nasution yang juga merupakan target mereka berhasil lolos.⁴⁴

Setelah hancurnya kekuatan komunis di Indonesia, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto-pun mulai menata dan memapankan kekuasaannya. Untuk membedakan dirinya dengan rezim Orde Lama, pemerintah Orde Baru mendefinisikan dirinya sebagai berikut:⁴⁵

1. Sebuah tatanan negara dan bangsa yang didasarkan atas pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
2. Sebuah tatanan yang berusaha mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila.
3. Sebuah tatanan yang membangun sistem negara dan masyarakat berdasarkan UUD, demokrasi dan hukum.
4. Sebuah tatanan hukum dan pembangunan.

Dengan demikian, Orde Baru merupakan rezim yang berkeinginan melakukan upaya koreksi terhadap rezim Orde Lama yang dianggap telah melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, dan mengupayakan suatu tatanan masyarakat adil dan makmur (sejahtera) secara material dan spiritual. Pada era tahun 1970 hingga 1980-an dakwah Islam terasa mengalami hambatan secara politis, hal ini disebabkan hubungan pemerintah dengan Islam politik yang cenderung represif. Islam dipandang sebagai ideologi

⁴³Pergolakan pemberontakan ini kemudian dikenal dengan G 30 S PKI (Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Buku Merah Putih terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia, *G 30 S Pemberontakan partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasan*, (Jakarta: Setneg, 1994).

⁴⁴Lihat Buku Merah Putih terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia, *G 30 S Pemberontakan partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasan*, h. 61.

⁴⁵Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), h.107-108.

yang membahayakan bagi kedaulatan negara, sehingga gerak politiknya harus dibatasi.⁴⁶

Setelah pupusnya harapan upaya menegakkan Islam melalui jalur politik, sebagian politisi Muslim tetap melanjutkan perjuangannya melalui jalur dakwah. Dalam kegiatan pengajian-pengajian dan forum-forum dakwah, para politisi tersebut tidak jarang mengeluarkan kritik-kritik pedas terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai mendiskreditkan kepentingan umat Islam. Oleh karena itu, Pemerintah memandang mereka sebagai rival yang mengancam stabilitas nasional dan mengganggu proses gerak laju pembangunan. Para perwira ABRI yang menjadi kunci dalam aparatur pemerintahan seperti M. Panggabean (1969/1973), Sudomo, (1974/1983), LB. Moerdani (1983/1988), pada saat M. Panggabean menjabat Komkamtib, melakukan kontrol terhadap para aktivis muslim dengan mengharuskan setiap da'i untuk mendapatkan izin dalam setiap berdakwah.⁴⁷

Deliar Noer; mengungkapkan bahwa “Banyak ulama dilarang berkhotbah pada suatu waktu atau waktu yang lain. Banyak di antara mereka yang telah dipenjara. Pada tahun 1978, ketika MPR bersidang untuk memilih Presiden, sejumlah pemimpin Muslim termasuk Bahbub Djunaedi (Sekretaris PPP dan mantan anggota Aliansi Jurnalistik Indonesia), Ismail Sunny (Profesor Hukum Tata Negara UI dan Rektor Universitas Muhammadiyah), Soetomo (Bung Tomo, Pahlawan Nasional dari Surabaya yang pada tahun 1977 membela gerakan Darul Islam melawan tuduhan yang melewati batas dari seorang pejabat), telah ditahan.

⁴⁶Menurut Husnun Aqib Suminto, sikap pemerintah ini disinyalir mengadopsi sikap pemerintah kolonial Belanda yang memiliki 3 kebijakan terhadap Islam di Indonesia; 1) Islam bidang agama murni atau ibadah diberikan keleluasan dan memberikan kemerdekaan umat Islam untuk melaksanakannya; 2) Islam dibidang sosial kemasyarakatan dibantu dengan memanfaatkan adat kebiasaan untuk kepentingan pemerintah; sementara, 3) Islam politik harus dicegah pergerakannya karena dinilai berusaha mengarah kepada Pan Islamisme untuk menentang penjajah, mengadakan perlawanan terhadap kedudukan Belanda. Lihat Husnun Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 12.

⁴⁷Pada kabinet 1973/1978 M. Panggabean (Protestan) diangkat sebagai panglima ABRI dan menteri Pertahanan, Laksamana Sudomo (Katolik) sebagai Komkamtib, LB. Moerdani (Katolik) memegang posisi yang sama pada periode 1983/1988. Ali Murtopo sebagai Opsus dan Bakin, para perwira ini yang mengendalikan situasi politik pemerintahan untuk mengekang aktivis-aktivis Muslim yang dipandang sebagai kelompok anti pemerintah Orba. Lihat, Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa, Geanologi Intelegensia Muslim Indonesia*, (Bandung: Mizan 2005), h. 495.

Demikian juga dengan Imaduddin Abdulrahim seorang dosen ITB yang aktif dalam gerakan dakwah di dalam dan di luar negeri”.⁴⁸

Tindakan dari sebagian tokoh-tokoh Islam tersebut, dalam penyampaian dakwah yang mengkritisi pemerintah dianggap tindakan subversif. Kecurigaan pemerintah terhadap para mubaligh mengharuskan para da'i/muballigh mengantongi izin atau setidaknya memberitahukan kepada pemerintah sebagai upaya pemerintah mengontrol secara ketat setiap gerakan dakwah Islam. Di sisi lain, terdapat pula kelompok-kelompok umat Islam yang menginginkan berdirinya Negara Islam Indonesia. Kelompok ini secara ideologis memang memiliki haluan yang berbeda dalam pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya pemerintah selalu mengambil sikap tegas dalam menangani mereka. Beberapa kejadian yang sempat mencuat dari tindakan tegas pemerintah terhadap gerakan ini antara lain adalah penanganan Gerakan Komando Jihad (Komji).⁴⁹ Meskipun memiliki beberapa kontroversi⁵⁰, namun isu gerakan ini menjadi alasan pemerintah dalam hal ini Kopkamtib untuk melakukan *swiping* terhadap kegiatan dakwah di Majelis-majelis Ta'lim, meskipun untuk Majelis Ta'lim yang dinilai pro pemerintah (seperti Al-Hidayah) mendapat perlakuan berbeda.

⁴⁸Deliar Noer, *Contemporary Political Dimension of Islam*, dikutip dari Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni*, h. 155.

⁴⁹Gerakan Komando Jihad dipimpin oleh Haji Ismail Pranoto, yang lebih dikenal dengan Hispran, dan Haji Muhammad Danu. Menjelang pemilu Juli 1977, gerakan ini melakukan aksi kekerasan dan teror di beberapa daerah, seperti Bukittinggi, Padang dan Medan. Panglima Kopkamtib Laksamana Soedomo mengumumkan bahwa beberapa anggota gerakan Komji telah ditangkap di Asahan (Sumut), Riau, Lampung, Jakarta, Jabar, Jateng dan Jatim. Lihat, Al Chaidar dan Tim Peduli Tapol Amnesti Internasional, *Bencana Kaum Muslimin di Indonesia 1980-2000*, (Yogyakarta: Adipura, 2000), h. 26.

⁵⁰Mantan Kepala Bakin, Letjen Soetopo Juwono menjelaskan saat diwawancarai oleh David Jenkins; “Ali Moertopo termasuk ke dalam kelompok ini. Dari awal dia mempunyai pandangan demikian. Ketika itu saya mencoba menghentikannya. Menurutnya, kita harus menciptakan berbagai isu. Dia mengatakan bahwa hal itu selalu ada dalam pikirannya. Saya coba membendunginya, tapi tidak mampu. Karena dia selalu menghadap Presiden. Dia mempunyai opsus”, sementara Soemitro menyatakan bahwa; “Ali Moertopo telah lama menjalin kerjasama dengan sejumlah bekas tokoh DI/TII. Garis kebijakan Ali Moertopo untuk mendekati para bekas DI/TII itulah yang menimbulkan permasalahan di dalam tubuh Bakin.... Setelah ikut Opsus, pada bekas DI biasanya mendapati suplai keuangan secara rutin dari Opsus, maklum mereka umumnya hidup miskin. Opsus rupanya selalu memelihara ilusi mengenai kemungkinan pendirian Negara Islam. di mata para bekas DI, bila Ali Moertopo menang maka ia akan mendirikan negara Islam. Tokoh-tokoh DI, percaya betul atas ucapan Ali Moertopo tersebut. lihat, David Jenkins, *Soeharto and His General; Indonesian Military Politics 1975-1983*, dikutip dari *Ideologi Hegemoni*, h. 195 dan Heru Cahyono, *Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 74*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), h. 195.

Kontroversi dari peristiwa Komando Jihad adalah disinyalir bahwa munculnya Gerakan Komando Jihad merupakan hasil rekayasa dari Opsus⁵¹ yang antara lain bertujuan menimbulkan situasi tidak harmonis antara umat Islam dan pemerintah. Dari beberapa data tersebut, maka pemerintah, dalam hal ini Kopkamtib, merasa perlu mewajibkan agar para da'i meminta izin sebelum berceramah dan melampirkan materi ceramahnya. Namun demikian, sikap tersebut dinilai oleh sebagian tokoh-tokoh Islam sudah keterlaluan. Karena hal ini justru akan memperuncing keadaan.

Untuk menghindari suasana curiga mencurigai antara pemerintah dengan ulama, Menteri Agama melakukan dialog dengan Presiden dan Komkamtib yang akhirnya keluarlah keputusan Menteri Agama No. 44 tahun 1978 tentang pembebasan izin untuk berdakwah dan kuliah subuh. Upaya yang dilakukan Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara ini merupakan bentuk pendekatan pemerintah terhadap umat Islam atau justru mempolitisir aktivitas dakwah para muballigh.

Dalam Keputusan Menteri Agama No. 44 Tahun 1978, Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama memutuskan antara lain, bahwa:

1. Pelaksanaan Dakwah agama dan kuliah subuh melalui Radio tidak memerlukan izin terlebih dahulu, dengan ketentuan; a) tidak mengganggu stabilitas nasional, b) tidak mengganggu jalannya pembangunan nasional; c) tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.
2. Aparat Departemen Agama berkewajiban memberikan bimbingan dan pengawasan atas pelaksanaan dakwah agama dan kuliah subuh melalui radio di daerah wewenang masing-masing sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵²

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri tersebut, maka diinstruksikan kepada Kepala Departemen Agama Propinsi/setingkat se-Indonesia melalui Instruksi Menteri Agama No. 9 Tahun 1978. Dalam Surat Edaran Menteri

⁵¹Opsus (Operasi Khusus) sebuah lembaga tidak resmi yang diotaki Ali Moertopo. Lihat, Zaki Mubarak, *Geologi Islam Radikal di Indonesia, Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, (Jakarta; LP3ES, 2008), h. 80.

⁵²Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Beragama*, (Proyek perencanaan Peraturan Perundang-undangan Keagamaan Departemen Agama, Tahun Anggaran, 1984/1985), h. 58.

Agama No. 3 Tahun 1978, dijelaskan tentang pengertian dakwah Agama; yakni dakwah Agama Islam yang meliputi antara lain; 1) Pengajian-pengajian baik harian, mingguan, tengah bulan atau bulanan; 2) Majelis-Majelis Ta'lim di Mesjid, di Pesantren atau di Madrasah atau di rumah-rumah baik untuk kaum Ibu, para bapak, campuran atau khusus untuk pemuda dan remaja; 3) peringatan-peringatan hari besar Islam; 4) Upacara-upacara keagamaan; 5) ceramah-ceramah keagamaan yang dilaksanakan ditempat-tempat tertentu; 6) Drama atau pertunjukan kesenian bernafaskan agama; 7) usaha untuk maslahat orang banyak.⁵³ Upaya Menteri Agama pada saat itu, Alamsyah Ratu Perwiranegara dalam mensosialisasikan keputusan tersebut sebagaimana disampaikan pada pidato sambutannya dalam Seminar Dakwah Islam se-Sumatera Utara Medan tanggal 29 Maret 1981, ia mengungkapkan bahwa latar belakang Keputusan Menteri Agama tersebut didasarkan pada tanggung jawab pemerintah dalam membina kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan Majelis Ta'lim, ungkapan Menteri Agama tersebut, terkait dengan pelaksanaan Majelis Ta'lim yang cukup semarak diselenggarakan di masjid-masjid. Melalui ungkapan dari Menteri Agama tersebut, maka kegiatan Majelis Ta'lim yang diselenggarakan di masjid-masjid menjadi terbatas dalam masalah-masalah *'ubudiyah* saja, tidak boleh menyinggung masalah-masalah *mu'amalah* sesama manusia termasuk hal-hal yang bernuansa politik. Padahal, selain masalah *ukhrawiyah*, Islam juga mengatur masalah-masalah *dunyawiyyah* termasuk di dalamnya masalah-masalah kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat, jika tidak bisa disebut dengan "politik". Hubungan Islam dengan politik pada dasarnya telah menjadi perdebatan dikalangan umat Islam, ada yang menyatakan bahwa Islam juga mengatur masalah-masalah politik, ada juga yang tidak mengakuinya.⁵⁴

Pada hakikatnya secara konseptual kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru dalam hal ini Menteri Agama dalam Kep. Men. No. 44 Tahun 1978 didasarkan pada upaya stabilisasi nasional. Mengingat isu politik Islam pada masa-masa tersebut merupakan isu yang rawan konflik, maka salah satu upaya

⁵³*Ibid.*, h. 63-64.

⁵⁴Untuk lebih jelasnya permasalahan hubungan Islam dan politik, lihat, Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik, Upaya Membingkai Peradaban*, (Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999).

pemerintah dalam menekan terjadinya gesekan antara pemerintah dan umat Islam adalah dengan mengatur pedoman penyiaran agama.

Dari keputusan tersebut dan konsep tri kerukunan, maka ada upaya pemerintah dalam mengeleminasi aspirasi umat Islam dalam bidang politik mencakup pula pada bidang organisasi dakwah Islam (organisasi sosial keagamaan). Pada hakikatnya pemerintah menghendaki adanya konsekuensi disiplin gerak organisasi sosial keagamaan, dengan tetap konsisten dalam tujuan dan peranannya. Namun pandangan tersebut secara tidak langsung menghambat peranan politisi Muslim. Mengingat keberadaan mereka selain sebagai pemimpin organisasi dakwah, mereka juga terjun dalam dunia politik seperti yang dialami oleh Muhammad Natsir dengan organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia-nya.⁵⁵

Dari beberapa data tersebut, maka dapat diketahui bahwa media Majelis Ta'lim/pengajian merupakan sarana yang cukup efektif dimanfaatkan oleh berbagai macam kalangan dan kepentingan. Termasuk juga upaya-upaya penyebaran faham/ajaran agama. Di samping itu, para politikus juga memanfaatkan forum Majelis Ta'lim untuk melakukan agitasi politik terhadap penguasa. Oleh karenanya cukup beralasan jika Pemerintah melakukan beberapa tindakan tegas dalam mengatur pelaksanaan dakwah dan ceramah keagamaan.

Meskipun dalam upaya penerapan kebijakan ini menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan sebagian umat Islam dengan Pemerintah, namun kebijakan tersebut tetap dilaksanakan. Hal ini tampaknya merupakan harga mati bagi pemerintah untuk menjauhkan umat Islam dari Islam sebagai ideologi negara. Perjuangan politik Islam pada hakikatnya merupakan rentetan peristiwa masa lalu dalam memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara, namun upaya-upaya tersebut secara sistematis telah digagalkan oleh pemerintah. Puncak kegagalan politik Islam adalah dengan penetapan Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebijakan Orde Baru dalam melakukan depolitisasi Islam politik ini setidaknya didasarkan pada; *Pertama*, intervensi pemerintah merupakan cerminan

⁵⁵Lebih lanjut lihat dalam Panitia Peringatan Mohammad Natsir/Mohammad Roem 70 Tahun, *Mohammad Natsir 70 Tahun, Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, (Jakarta: Pustaka Antara, cet. 1, 1978), h. 78.

watak otoritarianisme Orde Baru. Salah satu syarat tidak tertulis dari rekrutmen politik dalam model negara otoriter adalah keinginan rezim untuk memobilisasi individu-individu atau kelompok yang bersedia kooperatif terhadap negara. *Kedua*, militer –komponen utama Orde Baru- menganggap bahwa partai Islam yang terorganisasi dengan baik dapat menjadi saingan utama dalam mempertahankan status quo. Partai Islam semacam ini berpotensi menggalang dukungan lebih besar daripada kelompok lain, karena secara statistik umat Islam di Indonesia merupakan komunitas terbesar. *Ketiga*, pengalaman sejarah mengingatkan bahwa, partai Islam yang terorganisasi dengan baik cenderung memaksa negara untuk memberlakukan hukum Islam sebagai konstitusi nasional. Bagi pemerintah Orde Baru, perdebatan tentang dasar negara selama ini merupakan pengalaman pahit yang tidak boleh terulang lagi. Karenanya kekuatan politik umat Islam tidak diberi toleransi untuk hidup dengan normal karena terlanjur dipandang membahayakan persatuan nasional. *Keempat*, intervensi adalah pengungkapan dari adanya konflik budaya antara perwira-perwira militer utama di sekitar Soeharto yang kebanyakan berpandangan abangan, menghadapi kelompok Muslim santri yang dinilainya sebagai kelompok yang berpandangan asing.⁵⁶

Pada masa selanjutnya, Menteri Agama Munawir Sadzali melanjutkan program Alamsyah Ratu Perwiranegara dengan konsep Kemitraan Pemerintah dengan ulama/tokoh agama. Sebagaimana diungkapkan oleh Munawir Sadzali bahwa tugasnya sebagai Menteri Agama, pembantu Mandataris di bidang keagamaan adalah mengajak tokoh-tokoh agama Indonesia untuk mencari jalan bagaimana melaksanakan amanat GBHN 1983, tentang azas tunggal bagi ormas-ormas yang bersifat keagamaan tanpa mengurangi keutuhan akidah dan iman.⁵⁷

Upaya Munawir Sjadzali pada dasarnya merupakan sosialisasi secara lebih dalam penerapan azas tunggal Pancasila. Dalam beberapa kesempatan ia meyakinkan kepada umat Islam bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pada prinsipnya Islam memberikan nilai-nilai dasar dan tidak memberikan preferensi pola politik yang baku. Karena itu terbuka peluang kebebasan bagi

⁵⁶Affan Gaffar, *Javaness Voters*, (Yogyakarta: UGM Press, 1992), h. 48.

⁵⁷Munawir Sjadzali, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, (Jakarta: UI Press, 1983), h. 36.

umat Islam untuk menentukan pola kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebudayaan masing-masing.⁵⁸ Pandangan Munawir tersebut, pada hakikatnya mencerminkan ide pemisahan antara masalah politik dengan agama, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Agama sebelumnya. Dalam rangka melestarikan penerapan azas tunggal di kalangan ormas keagamaan, Departemen Agama menyelenggarakan Penataran P-4 bagi pemuka agama dan rohaniwan pada setiap propinsi, yang dimulai sejak 1983 hingga 1988.⁵⁹ Selain itu, dalam upaya pemerintah memperbaiki hubungan dengan kaum muslimin, Pemerintah melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh Islam, menyemarakkan kegiatan-kegiatan keagamaan, membantu dan memfasilitasi kebutuhan umat Islam dalam hal peribadatan. Setelah azas tunggal berhasil diterapkan pemerintah membalas pengorbanan umat Islam dengan kebijakan-kebijakan yang mengakomodir keinginan umat Islam.

Penutup

Politik dan pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun aspek pendidikan yang tersentuh oleh kepentingan politik adalah pendidikan non formal, dalam hal ini adalah Majelis Ta'lim. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan politik terhadap pendidikan mempunyai signifikansi tersendiri, terlebih Majelis Ta'lim dengan tingkat fleksibelitasnya memberikan ruang konflik kepentingan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah maupun dari oposisi politiknya.

Upaya-upaya Pemerintah Orde Baru dalam mengatur pelaksanaan kegiatan Majelis Ta'lim agar tidak digunakan sebagai sarana politik praktis antara lain dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 44 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Dakwah Keagamaan dan Kuliah Shubuh di Radio, dan Instruksi Menteri Agama RI. Nomor 5 tahun 1981 tentang Bimbingan Pelaksanaan Dakwah/Khutbah/Ceramah Agama. Hal ini merupakan upaya Pemerintah dalam meredam kepentingan-kepentingan politik Islam dalam

⁵⁸Munawir Sjadzali, *Mengapa Umat Islam Indonesia Terima Azas Tunggal?*, (selanjutnya disingkat; "Mengapa Umat Islam", dalam Penuntun Amal Bakti, No. 27 Tahun III, Juni 1983, h. 17.

⁵⁹Munawir Sjadzali, *Kiprah Pembangunan Agama Menuju Tinggal Landas*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), h. 77.

mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan kepentingan umat Islam.

Upaya pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakannya tersebut dilakukan melalui 1) pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh umat Islam, 2) membentuk organisasi-organisasi yang menampung aspirasi umat Islam seperti, ICMI, DKMI, KODI dan lain sebagainya, 3) merespon aspirasi umat Islam dengan menghapus kebijakan-kebijakan yang dinilai mencederai kepentingan umat Islam, seperti pelarangan jilbab di sekolah-sekolah, penghapusan SDSB, dan lain-lain, 4) memenuhi aspirasi kepentingan umat Islam seperti membangun masjid-masjid di pelosok-pelosok daerah, pembentukan Bank Muamalat, pengiriman da'i-da'i ke daerah transmigran, dan lain-lain.

Reaksi umat Islam dalam menanggapi kebijakan Pemerintah tersebut antara lain, dengan melakukan restrospeksi dalam penyampaian dakwah mereka, sehingga tidak menimbulkan kerawanan di tengah-tengah masyarakat. Meskipun hal ini sempat menimbulkan reaksi keras dari umat Islam, bahkan sempat menimbulkan ketegangan antara Pemerintah dan umat Islam, terutama para politisi muslim.

Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, adalah terciptanya hubungan harmonis antara Pemerintah dan umat Islam. Sebagaimana terlihat dari kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan umat Islam dan semakin banyaknya tokoh-tokoh umat Islam yang duduk baik di parlemen maupun Kabinet Pembangunan IV dan V. Meskipun demikian tidak seluruh umat Islam merasa puas dengan kepemimpinan Orde Baru, terutama bagi gerakan-gerakan yang memiliki ideologi yang berbeda seperti gerakan pembentukan Negara Islam Indonesia. Gerakan ini tetap eksis dengan pola gerakan bawah tanahnya.

Daftar Pustaka

- Abd. Mukti, *Konstruksi Pendidikan Islam (Belajar dari Kejayaan Madrasah Nizamiyah Dinasti Saljuq)*, Bandung: Citapustaka Media, cet. I, 2007.
- Alawiyah, Tutty AS, *KH. Abdullah Syafi'ie; Pribadi, Visi dan Derap Perjuangannya*, dalam Tutty Alawiyah AS (ed), *KH. Abdullah Syafi'ie*. Jakarta: Perguruan Islam As-Syafi'iyah, 1999.
- Al-Chaidar dan Tim Peduli Tapol Amnesti Internasional, *Bencana Kaum Muslimin Indonesia 1980-2000*, Yogyakarta: Adipura, 2000.

Ali, Fachry, dan Bachtiar Effendy, *Merambah jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1986.

Alwi Shihab, *Majelis Ta'lim Kwitang di Masa Jepang*, <http://www.muslimdelft.nl/titian-ilmu/sejarah-islam/majelistaklim-habib-kwitangs-taklim-kwitang-di-masa-jepang/>, di akses tanggal 8 Juli 2015.

_____, *Majelis Ta'lim Kwitang di masa Jepang*. <http://www.muslimdelft.nl/titian-ilmu/sejarah-islam/majelis-taklim-habib-kwitang-taklim-kwitang-dimasa-jepang/>, di akses tanggal 9 Juli 2015.

Baedlawi, Azhari, *Profil KODI*, Edisi April, Jakarta: Dialog KODI, 2003.

Buku Merah Putih, terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia, *G 30 S Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasan*, Jakarta: Setneg, 1994.

Cahyono, Heru, *Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 74*, Jakarta: Sinar Harapan, 1998.

Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Beragama*, (Proyek perencanaan Peraturan Perundang-undangan Keagamaan Departemen Agama, Tahun Anggaran, 1984/1985).

Djamas, Nurhayati, *Gerakan Kaum Muda Islam Masjid Salman, dalam Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Eliot, Thomas H., *Toward an Understanding of Public School Politics, in American Political Science Review*, Vol. 53, No. 4 December).

Gaffar, Affan, *Javaness Voters*, Yogyakarta: UGM Press, 1992.

Hadzami, Muhammad Syafi'i, *Sumur Yang Tak Pernah Kering*, Jakarta: Yayasan Al 'Asyrotussyafi'iyah, cet. 1, 1999.

Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995.

Hakim, Lukman, *70 Tahun H. Buchari Tamam: Menjawab Panggilan Risalah*, Jakarta: Media Dakwah, 1992.

<http://yusril.ihzamahendra.com/2008/01/31/kebijakan-orde-baru-terhadap-masyumi-dan-islam/>, didownload tanggal 18 Juli 2015.

<http://www.islamic-centre.or.id/component/content/article/31-kajian/175-peran-majelistaklim-di-betawi/>. Di unduh pada tanggal 9 Juli 2015.

- [http://www.islamic-centre.or.id/data/KH.M.Syafi'iHadzami /](http://www.islamic-centre.or.id/data/KH.M.Syafi'iHadzami/), diakses tanggal 4 Juli 2015.
- Huda, Nurul, *et.al.*, *Pedoman Majelis Ta'lim*, Jakarta: *Proyek Penerangan Bimbingan Dakwah Khutbah Agama Islam Pusat*, 1984.
- Imron, Ali, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan Masa Depan*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. I, 1996.
- Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Joesoef, Soelaiman, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Jakarta: PT. Hanindra, 1985.
- _____, *Negara dan Peminggiran Islam Politik, Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan Bagi Keberadaan Islam Politik di Indonesia Era 1970-an dan 1980-an*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, cet. I, 1999.
- Koperasi Pegawai Kanwil Dikbud Jawa Barat, *Himpunan Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Kesiswaan*, Bandung: Koperasi Pegawai Kanwil Dikbud Jawa Barat, 1997.
- Latif, Yudi, *Intelegensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia*, Bandung: Mizan, 2005.
- Lubis, Sofjan, *et.al.*, *30 Tahun GOLKAR*, Jakarta: DPP Golkar, 1994.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Politik, Upaya Membingkai Peradaban*, Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999.
- Marjono, Hartono, *Politik Indonesia (1996-2003)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mauladdawillah, Abdul Qadir Umar, *Tiga Serangkai Ulama Tanah Betawi*, Jakarta: Pustaka Basma, 1995.
- Mehdem, Von Der, *Politics of Developing Nations*, New Jersey: Prentince-Hall, Inc Englewood, t.t..
- Moertopo, Ali, *Strategi Politik Nasional*, Jakarta: CSIS, 1974.
- Mubarok, Zaki, *Geanologi Islam Radikal di Indonesia, Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, Jakarta; LP3ES, 2008.

- Al-Nahlawy, ‘Abd. al-Rahman, *Ushûl al-Tarbiyah al-Islâmiyah wa Asâlibuhâ*, Dâr al-Fikr: Damsyik, t.t..
- Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Panitia Peringatan Mohammad Natsir/Mohammad Roem 70 Tahun, *Mohammad Natsir 70 Tahun, Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, Jakarta: Pustaka Antara, cet. 1, 1978.
- Sjadzali, Munawir, *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, Jakarta: UI Press, 1983.
- _____, *Mengapa Umat Islam Indonesia Terima Azas Tunggal?*, (selanjutnya disingkat; “Mengapa Umat Islam”, dalam *Penuntun Amal Bakti*, No. 27 Tahun III, Juni 1983).
- _____, *Kiprah Pembangunan Agama Menuju Tinggal Landas*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986).
- Sirozi, M., *Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suminto, Husnun Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Supandi dan Achmad Sanusi, *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan*, (Jakarta: P2LPTK, 1988).
- Syamsuddin, Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2003.
- Syukur, Abdul, *Gerakan Usroh di Indonesia: Kasus Peristiwa Lampung 1989*, Tesis, Jakarta: UI, 2001.
- Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara, dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Tirtarahardja, Umar, dan La Sulo, S. L., *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. II, 2005.